

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

A.A. Oka Mahendra, 2017, *Pedoman Praktis Legal Drafting Panduan Praktis Merancang Peraturan Perundang-undangan secara Jelas dan Efektif*, Teknis, Malang: Setara Press.

Abhan dkk, 2018, *Fenomena Calon Tunggal Studi Kasus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota*, Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Abhan, Asep Mufti, & Ihkwan, 2017, *Pasangan Calon Melawan Kolom Kosong*, Semarang,

Achmad Ruslan, 2013, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rankang Education.

Amir Hamzah, dkk., 2003, *Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahyono*. Cet. Ketiga. Indo- Hill Co.: Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2015, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2018, *Anomali Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Terhadap Perspektif Hak Memilih dan Dipilih*, Jakarta.

Badan Pengawasan Pemilu. 2020, *Catatan Pengawasan Pemilihan*, Buku 3

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico.

\_\_\_\_\_, 2000, *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direjen Dikti Depdiknas.

\_\_\_\_\_, 2006, *Lembaga Kepresidenan Edisi Revisi*, Yogyakarta: FH UII Press.

Bruggink J.J.H, *Rechts Reflecties*, 1996, Grondbegrippen uit de Rechtstheorie, terjemahan Arif Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Burns, J.M., Peltason, J.W., & Cronin, T.E., 1989, *Government by The People*, New Jersey: Englewood Cliffs.
- Cakra Arbas, 2012, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta: T. Sofmedia.
- Dahlam Thaib, 2000, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan (Studi Tentang MPR Sebagai Pelaku Kedaulatan Rakyat Sepenuhnya)*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Liberty.
- Dardji Darmodihardjo, 1979, *Orientasi Singkat Pancasila*, Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.
- Deddy Ismatullah Dan Enung Nurjanah, 2018, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Donni Edwin dkk, 2005, *Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah Dan Mitos Good Governance*, Jakarta: Partnership.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana.
- Hamza Halim dan Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Hukum Dibawah Tekanan Oligarki : Risalah Tentang Hukum, Oligarki, Demokrasi dan Sistem Kekuasaan*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Sleman.
- Hani Adhani, 2019, *Sengketa Pilkada Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers.
- Harun Alrsyid, 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Hufron dan Syofyan Hadi, 2016, *Ilmu Negara Kotemporer*, Laksbang Grafika, Surabaya.

- Jaka Triwidaryanta dalam Jamil Gunawan, dkk (ED), 2005, *Kinerja Pemerintahan Desa dan Demokrasi Desa, Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, LP3S, Jakarta.
- Janedjri M.Gaffar, 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpress.
- JHA. Logeman, 2008. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Edisi Terjemahan, Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Jimly Asshiddiqie, 1995, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani, Press, Cet.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press: Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
- \_\_\_\_\_, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik*, Jurnal Konferensi Hukum Tata Negara ke-2 di UNAND, Padang.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta.
- Joenirto, 2000. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karim, M.R. 1991, *Pemilu Demokrasi Komperatif*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kasman Singodimedjo, 1978, *Masalah Kedaulatan*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. Pertama.
- Kurniawati Hastuti Dewi dkk, 2016, *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah*

- Demokratis, Akuntabel dan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Calpulis.
- Kurniawati Hastuti Dewi dkk, 2016, *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis, Akuntabel dan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Calpulis.
- Laode Harjudin, 2005, *Pilkada Eksprimen Kedaulatan Rakyat*, Jawa Pos.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2017, *Hukum dan Kebijakan Publik (Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal Dalam Perspektif Politik Kesejahteraan)*, Malang: Setara Press.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maschab, M. 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov Universitas Gajahmada.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad. Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid I. Yayasan Prapanca: Jakarta.
- Pamungkas, S. 2009, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Pemerintahan Fisipol UGM
- Prodjodikoro, W, 1981, *Asas-Asas Ilmu Negara & Politik*, Cetakan ke-2. Jakarta: PT Eresco.
- Raisul Muttaqien, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan I, Bandung: Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Ramlan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rusminah, *Bentuk Pemerintahan dan Implementasinya Berdasarkan Undang-Undang Dasar*, dalam Pad mo Wahjono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta.

- Sarundajang, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Problematika dan Prospek*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suharizal, 2011, *Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Syamsuddin, 2015, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Von Achmid dalam Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. UI-Press: Jakarta.
- Yashinta Sastaviana Hikmania, 2019, *Pergulation Konsep Cotested Election dan Uncontested Election (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017)*, Kompilasi Ringkasan Tesis Tata kelolala Pemilu Edisi I.

## **JURNAL**

- Ekowati, Endah Yuli, 2019, *Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada*, Jurnal Transformative, Vol.5, Nomor 1.
- Engkus dkk, 2019, *Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Tasikmalaya*, Politicon: Jurnal Ilmu Politik Vol.1 No.1.
- Erniyanti, 2018, *Kajian Kritis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 13 Nomor 2.
- Hardiyanto, Suharso, dan Budiharto, 2016, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)*, Jurnal Varia Justicia, Vol.12 Nomor 1.
- Maulidi, M. A. 2019. *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision of*. Jurnal Konstitusi, 16.
- Mohammad Mahrus Ali, 2015, *Tafsir Sistematis Pilkada Demokratis*, *Majalah Konstitusi*, No. 104, , Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

- Mohammad Syafei, 2016, *Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/ 2015 tentang Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Jurnal Legal Opinion, Vol. 4 Nomor 5.
- Muhamad Labolo, *Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Administrasi Pemerintah Darah Volume VIII, Edisi 2.
- Muhammad Malikul Lubbi, 2015, *Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Program Magister Hukum Fak. Hukum UI, Volume 1 Nomor 2.
- Nazriyah, R. 2016. *Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015*. Jurnal Konstitusi, 13(2).
- Nopyandri, 2011, *Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Dalam Perspektif UUD NRI 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No.2.
- Nurfaika Ishak, 2020, *Problematika Pemilihan kepala daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 19, No. 2, Desember.
- R. Nazriyah, 2016, *Calon Tunggal dalam PILKADASerentak Tahun 2015 Terhadap Putusan Mahkamah KonstitusiNo 100/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Edisi No. 2, Vol. 13, Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Simanjuntak, Novembri Yusuf, 2020, *Pilkada Satu Pasang Calon Tahun 2017 Di Kabupaten Pati Dan Kota Tebing Tinggi (Studi Tentang Third Party Campaign) Dalam Pilkada Satu Pasang Calon Tahun 2017 Sebagai Persaingan Yang Bebas Dan Adil*, Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2, [www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id).
- Sodikin, 2014, *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Cita Hukum Vol. II No.1.
- Sodikin, 2015, *Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks UUD NRI 1945*, Jurnal Rechtsvinding Volume 4 Nomor 1.

Suyatno, 2016, *Pemilihan Kepala Daerah Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia*, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1(2)

Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2020). *Calon tunggal pilkada kurangi kualitas demokrasi*. *Jurnal Yudisial*, 12(3).

Tony Yuri Rahmanto, 2018, *Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten*, *Jurnal HAM* Vol.9 No. 2.

Wafia Dhesinta, 2016, *Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi*, *Jurnal Cita Hukum*, Universitas Islam Negeri Jakarta Gresik.

### **ARTIKEL DAN KARYA ILMIAH**

Arief Hidayat, 2017, materi disampaikan dalam kegiatan "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Knl)" di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019 serta juga pernah disampaikan pada Seminar Nasional Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada 9 September 2017 bertempat di Universitas Atmajaya.

Dieter Nohlen, 1995, *Voting Rights*, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), 1995, *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.), hlm. 1353-1354, dikutip dari Hasyim Asy'ari, *Pendaftaran Pemilih di Indonesia*, Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional", Jakarta.

*Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, International IDE, terj. CETRO (Center For Electoral reform), 2010, Jakarta, Indonesia Printer.

Gregor Polancic, "*Empirical Research Method Poster*", 2007.

Komisi Pemilihan Umum, "*Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)*" Edisi III Maret- April 2015.

Maria Farida Indrati Soeprato, 1997, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Negara*, *Cita Hukum*

*dan Norma Fundamental Negara Republik Indonesia.*  
Tesis.Suyatno, 2016, Pemilihan Kepala Daerah Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1(2)

Sekretariat Jendral MPR RI, 2008, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik*

Soewoto Mulyosudarmo, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang.

Suhartoyo, MK: *Calon Tunggal Dipilih Melalui Kolom “Setuju” dan “Tidak Setuju”*,

Supriyadi,2006,*Buku Ajar Demokrasi dan Demokratisasi”* Penerbit Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Suyadi Prawirosentono, 1999, *“Kebijakan Kinerja Karyawan; Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia”*, Yogyakarta.

Taufiqqurahman Syahuri, 2003, *Anatomi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pilkada*, Seminar Putusan MK Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Kerjasama Puslitka MK dan PS-HTN FH.UI, Menara Cakrawala

Thomas Tokan Pureklolon, 2020, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, PT Kanisius.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Prenada Media Group.

Tricahyo, Ibnu, 2009, *Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-Trans Publishing

Schumpeter, Joseph. 2003. *“Capitalism, Sosialism, and Democracy”*. (Ed.) Dahl, Shapiro & Cheibub. The Democracy Sourcebook. London : The MIT Press.

## **WEBSITE**

Anjar Pramudya, Aprilla Putrikasari, *Berlianna Indah Permata*,Destika  
Fizriani, 2016, Subyek Hukum,



[http://aprillaputrikasari.blogspot.co.id/2016/03/subyek-hukum\\_83.html](http://aprillaputrikasari.blogspot.co.id/2016/03/subyek-hukum_83.html) diakses 25 Mei 2018.

Anjar Pramudya, Aprilla Putrikasari, Berlianna Indah Permata, Destika Fizriani, 2016, *Subyek Hukum*, [http://aprillaputrikasari.blogspot.co.id/2016/03/subyek-hukum\\_83.html](http://aprillaputrikasari.blogspot.co.id/2016/03/subyek-hukum_83.html).

Aprilia riska dwi kurniandani, 2017, *Teori-Teori Konseling*, <https://apriliariskadwikurniandani.wordpress.com/carl-r-roger-teori-person-centered>, diakses 25 Mei 2018.

Arnold H Sianturi, *KPU Sumut Kekurangan Dana Pilkada Rp 210 Miliar*, <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/politik/644953/kpu-sumut-kekurangan-dana-pilkada-rp-210-miliar>.

Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, 2012, *Demokrasi*, dalam <http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf>.

GuruPPKN.com, 2015, *23 pengertian demokrasi menurut para ahli* dalam <https://gurupkn.com/pengertian-demokrasi>.

Hendrik, 2018, *Pakar Sebut, Kolom Kosong Bisa Mencederai Pilkada Makassar*, <http://www.inikata.com/pakar-sebut-kolom-kosong-bisa-mencederai-pilkada-makassar>.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/15201091/MK.Calon.Tunggal.Dipilih.Melalui.Kolom.Setuju.dan.Tidak.Setuju>.

[http://www.eld.gov.sg/about\\_corporate.html](http://www.eld.gov.sg/about_corporate.html).

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2971:hak-konstitusional-warga-negara&catid=100&Itemid=180](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2971:hak-konstitusional-warga-negara&catid=100&Itemid=180).

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180).

<https://malangkota.bawaslu.go.id/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua/>

<https://mediaindonesia.com/opini/49461/plebisit-vs-kolom-kosong>.

<https://rumahpemilu.org/dominasi-calon-tunggal-tak-terbendung/>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16681>.

Inggried Dwi Wedhaswary, *Ini isi perppu pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY*, <http://nasional.kompas.com>.

Kompasiana, 2019, *dalam Pelaksanaan demokrasi di indonesia*, <https://www.kompasiana.com/naurareva/5cfcad1b3d68d555906baa57/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia?page=all>.

lection Glossary, Ballot Box Election, diakses dalam <https://www.polyas.com/electionglossary/ballot-box-election>

Nining Masitoh, 2019, *dalam demokrasi dan sistem pemerintahan negara*, <http://niningmasitoh.blogspot.com/2017/03/demokrasi-dan-sistem-pemerintahan-negara.html>.

Reza Gunadha & Erick Tanjung, 2017, *Unik! Calon Tunggal Pilkada Pati Dikalahkan "Kolom Kosong*, <https://www.suara.com/news/2017/02/16/113106/unik-calon-tunggal-pilkada-pati-dikalahkan-kolom-kosong>.

Usep Hasan Sadikin, 2022, *Calon Tunggal Rasa Minimal*, dikutip dari <https://rumahpemilu.org/calon-tunggal-rasa-minimal/>.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  
Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004 Pengujian UU  
Pemda Terhadap UUD 1945 hal.61

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06-32/PHPU-PDP/XII/2014  
dibacakan pada tanggal 25 Juni 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang Uji  
Materi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap UUD  
1945